

ANALISIS DATA SEKUNDER IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM COMPUTER ASSISTED TEST (CAT) PADA PENERIMAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI PROVINSI PAPUA

Isminkogoya, Ermaya Suradinata & Baharudin Thahir

Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jakarta, Indonesia

Corresponding Author: isminkogoya95@gmail.com

ABSTRACT

Penelitian ini berdujul tentang Analisis Data Sekunder Implementasi Kebijakan Sistem Computer Assisted Test (CAT) Pada Penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Provinsi Papua, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Sistem Computer Assisted Test (CAT) Pada Penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Provinsi Papua. Metode dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif untuk mendalami tingkat Analisis Data Sekunder Implementasi Kebijakan Sistem Computer Assisted Tes CAT Pada Penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Provinsi Papua. Peneliti berusaha mendapatkan gambaran dari keadaan yang berlangsung secara konkrit sehingga dapat memperoleh data yang akurat untuk menganalisa fenomena yang diamati. Penelitian ini menggunakan teori model implementasi Van Meter dan Van Horn adalah sebagai berikut: Standar dan Sasaran Kebijakan; Sumber Daya; Komunikasi Antar Organisasi Terkait dan Kegiatan Pelaksanaan; Karakteristik Organisasi Pelaksana; Kecenderungan Pelaksana; Lingkungan Ekonomi Sosial dan Politik. Hasil penelusuran Data Sekunder dan Dokumen yang diperoleh peneliti tentang implementasi kebijakan sistem *Computer Assisted Test (CAT)* pada penerimaan Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Papua. Dalam hal Kesiapan pelaksanaan Implementasi Kebijakan Sistem Computer Assisted Test (CAT) Pada Penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Provinsi Papua. Sejak menetapkan kebijakan rekrutmen CPNS belum berjalan optimal. Adapun hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan CAT yakni, kurangnya Jaringan Internet, kurangnya informasi serta sumber-sumber daya yang mendukung pelaksanaan CAT menjadi hambatan.

Keywords: Implementasi Kebijakan, Kebijakan Computer Assisted Test, Analisis Data Sekunder

INTRODUCTION

Profesi sebagai "*civil servant*" atau Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur penting dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aparatur Negara juga sebagai "Mesin" birokrasi yang menggerakkan sumberdaya-sumberdaya yang tersedia untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pemerintahan. Disisi lain, Aparatur Negara menjadi pelopor dalam mensukseskan pembangunan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana dicita-citakan seluruh bangsa Indonesia.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan PNS sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013. Menjelaskan bahwa pengadaan PNS harus berdasarkan prinsip transparan, objektif, kompetitif, akuntabel, tidak diskriminatif, bebas dari praktek-praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) dan tidak dipungut biaya. Seiring dengan itu pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*. Salah satu

pengembangan *E-Government* yang dilakukan adalah implementasi sistem *Computer Assisted Test* (CAT) yang dikembangkan Badan Kepegawaian Negara. Langkah tersebut untuk mewujudkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam melaksanakan Proses Rekrutmen atau seleksi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Computer Assisted Test (CAT) merupakan tes dalam seleksi CPNS berbasis komputer, dimana nilai dapat dimonitor langsung oleh masyarakat umum saat peserta mengerjakan soal atau usai tes. Dengan hadirnya CAT sejak tahun 2013, diharapkan Negara mendapatkan sumber daya manusia yang profesional. CAT adalah suatu metode seleksi dengan alat bantu komputer yang digunakan untuk mendapatkan standar minimal kompetensi dasar yang digunakan dalam seleksi CPNS. Tujuannya untuk memperoleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, memiliki nilai dasar, dan etika profesi dalam melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan. (sumber: <https://menpan.go.id>. di akses 9 Februari 2021).

Kegunaan *Computer Assisted Test* (CAT) adalah metode ujian menggunakan *software* dengan alat bantu komputer dimana dalam aplikasi tersebut tersedia soal-soal ujian antara lain; Tes Kompetensi Dasar (SKD) yang terdiri dari Tes Pengetahuan Umum (*knowledge*), Tes Bakat Skolastik (*skill*), Tes Skala Kemantangan (*attitude*). CAT hadir hasil studi banding (*bench mark*) dari Negara-Negara yang telah menggunakan CAT misalnya *Civil Service Commission* di Filipina. Dikembangkan BKN dengan berbagai perubahan yang disesuaikan dengan norma, situasi dan kondisi system kepegawaian yang ada. Dengan tujuan implementasi CAT pada penerimaan CPNS adalah untuk mempercepat proses pemeriksaan dan laporan hasil ujian, menciptakan standarnisasi hasil ujian secara nasional, menerapkan standar nilai, dan menghindari kemungkinan adanya Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) dalam proses seleksi CPNS.

Bertolak dari paparan diatas maka, Daerah yang sudah menerapkan system CAT yang sukses yaitu salah satunya Provinsi DKI Jakarta. Pada tahun 2013, dengan formasi CPNS DKI Jakarta hanya diberi kuota sebanyak 1515 lowongan, hal ini sesuai yang diberikan Kemen PAN-RB. Untuk pendaftarannya diakses melalui situs www.rekrutmen.jakarta.go.id. Hasil implementasi system CAT pada seleksi CPNS di DKI Jakarta terbilang sukses dan terhindar dari kecurangan.

Kenyataan sebelumnya proses rekrutmen dengan system LJK terjadi peluang KKN dirujuk pada jual beli jabatan hal ini menyebabkan kondisi Indonesia sangat memprihatikan dengan keadaan PNS yang berjumlah makin gemuk, kondisi ini terlihat dari jumlah PNS sampai dengan akhir tahun 2013 adalah 4,46 juta orang. Bahkan jumlah porsi PNS yang berpendidikan SD masih cukup besar mencapai 1,58%, lebih besarnya dibandingkan dengan PNS berpendidikan S-3 yang hanya 0,21% (sumber: www.detik.com). jumlah Pegawai yang besar tetapi kinerja tidak efektif. Juga memberatkan sebagian pemerintah daerah yang mengalokasikan lebih dari 50% APBD untuk anggaran belanja pegawai. Hal ini yang membuat dampak APBD mengalami gangguan deficit serta terhambatnya pembangunan daerah.

Adanya permasalahan-permasalahan yang muncul mengenai pengelolaan PNS membuat pemerintah melakukan perubahan dalam rangka meningkatkan intensitas kepegawaian dengan mengeluarkan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang diharapkan mampu menjawab tantangan dan mengatasi permasalahan yang ada. lahirnya undang-undang ini juga merupakan langkah nyata pemerintah yang diambil untuk melakukan reformasi birokrasi di indonesia yang tertuang dalam Rencana Jangka Menengah Nasional 2005-2025, serta peraturan presiden Nomor 18 tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi.

Ketentuan Nilai ambang batas yang dipaparkan diatas adalah salah satu kunci yang harus dipenuhi oleh para peserta CPNS tahun 2018 serta tahun 2019, dengan harapan mendapatkan

sumber daya manusia memenuhi kompetensi dan siap dipaikain. Namun perlu ketahui bawa Tahapan ini banyak peserta yang tidak lolos, karena dianggap *passing grade* yang ditentukan pada peraturan Kemenpan RB tersebut terlalu tinggi. Hal ini membuat kekosongan pada lowongan formasi yang ada.

Mengapa terjadi penolakan kebijakan Nasional terkait CAT pada CPNS di provinsi Papua. Hal ini melihat dari sisi geografis Papua sangat unik dibandingkan dengan wilayah Indonesia lainnya, karena sebagian besar merupakan daerah pegunungan terjal dalam mendukung sarana-prasarana, insprastruktur jaringan internet yang masih minim dan terbatas," keadaan dan keterbatasan tersebut telah menyulitkan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mendukung, pemerataan implementasi kebijakan pemerintah pusat di pemerintah daerah. Hal yang sama diungkapkan Kepala Bagian Media dan Pengaduan Masyarakat BKN, Yudhantoro Bayu Wiratmoko menjelaskan bahwa formasi khusus itu diberikan pemerintah karena faktor geografis nya berbeda. Selain itu, Bayu mengklaim perlu kearifan lokal di Papua untuk pengembangan daerah itu sendiri. "Di sana wilayahnya sangat luas dan perlu perhatian lebih khusus. Dan banyak yang perlu dikembangkan di sana seperti kebutuhan muatan lokal di sana sebab Indonesia punya ciri khas sendiri," (Sumber : CNNIndonesia.com pada Rabu (26/9).

Berdasarkan beberapa alasan penolakan diatas dapat menyimpulkan bahwa masyarakat yang menolak seleksi PNS dengan sistem CAT tersebut dapat disebabkan ketidak jelasan kebijakan pada tahap implementasi CAT CPNS di tingkat daerah. faktor lain., kenyataan selama ini orang papua diletakan posisi lemah dengan stigma belum mampu, dan belum siap. Akhirnya mereka kehilangan kepercayaan diri dan tidak bisa ikut bersaing dengan daerah lain di indonesia.

Studi kebijakan merupakan sebuah taktik yang terencana dalam menyelesaikan masalah-masalah yang diusulkan oleh sekelompok orang atau pemerintah didalam lingkungan tertentu guna mencapai sebuah tujuan-tujuan yang diharapkan, implementasi kebijakan secara garis besar membahas tentang perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Namun dalam hal ini penulis mengambil konsep implementasi kebijakan, dikarenakan implementasi kebijakan mungkin lebih penting dibandingkan dari pembuatan kebijakan itu sendiri dikarenakan apabila sebuah kebijakan tidak dilaksanakan hal itu akan menjadi sebuah arsip yang tersimpan dengan rapih tanpa ada hasilnya, oleh karena itu sebelum membahas tentang konsep dari implementasi, penulis terlebih dahulu mencoba mennguraikan berbagai tentang implementasi yang didapatkan dari berbagai sumber. Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster (dalam Wahab, 2010: 64) dijelaskan sebagai berikut: konsep implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).

Berdasarkan pengertian ini maka dapat diketahui implementasi mengandung pengertian sebuah upaya atau proses untuk menjalankan sebuah keputusan tertentu. Dalam konteks studi mengenai kebijakan publik, makna dari implementasi ini bukanlah sekedar penerapan keputusan politik menjadi sebuah aksi nyata yang dapat dirasakan masyarakat melainkan juga mencakup keputusan, konflik, dinamika masyarakat, dan apa yang didapat masyarakat dari sebuah kebijakan. Maka jika mengacu pada definisi implementasi ini, dapat diasumsikan kalau proses implementasi merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan.

Sedangkan menurut Tahjan (2008:24), menjelaskan bahwa secara estimologis implementasi dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Sehingga bila dirangkaikan dengan

kebijakan publik, maka kata implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/disetujui dengan penggunaan sarana untuk mencapai tujuan kebijakan.

Sedangkan menurut Lipsky (dalam Subarsono, 2011:88), mengemukakan mengenai implementasi yaitu sebagai berikut implementasi melibatkan usaha dari *policy makers* untuk mempengaruhi apa yang oleh Lipsky disebut "*street level bureaucrats*" untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran (*target group*). Untuk kebijakan yang sederhana, implementasi hanya melibatkan satu badan yang berfungsi sebagai implementor, misalnya kebijakan pengurangan kemiskinan di pedesaan, maka usaha-usaha implementasi akan melibatkan berbagai institusi, seperti birokrasi Kabupaten, Kecamatan, Pemerintah Desa.

Sedangkan Lester dan Stewart (dalam Agustino, 2008:139), memberikan pandangan mengenai implementasi yaitu: "Bahwa Implementasi adalah suatu proses dan suatu hasil (*output*). Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (*output*), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih".

Oleh karena itu implementasi dipahami juga sebagai suatu proses, *output* dan *outcomes* apa yang di utarakan oleh Lester dan Stewart dalam Kusumanegara, (2010: 99), sebagai berikut: implementasi juga diartikan sebagai *outputs*, yaitu melihat apakah aktivitas dalam rangka mencapai tujuan program telah sesuai dengan arahan implementasi sebelumnya atau bahkan mengalami penyimpangan-penyimpangan. Akhirnya implementasi juga dikonseptualisasikan sebagai *outcomes*. Konseptualisasi ini terfokus pada akibat yang ditimbulkan dari adanya implementasi kebijakan, yaitu apakah implementasi kebijakan mengurangi masalah atau bahkan menambah masalah baru dalam masyarakat.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas mengenai implementasi yang telah dikemukakan oleh para ahli maka penulis menarik sebuah kesimpulan bahwa implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah proses rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi dilakukan setelah proses perumusan dan perencanaan yang telah tersusun dan sudah dianggap layak untuk dilaksanakan. Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

METHODS

Penelitian merupakan proses penerapan suatu pendekatan ilmiah untuk mengkaji sebuah masalah dengan tujuan untuk menemukan, membutuhkan dan mengembangkan pengetahuan yang diperoleh agar hasil dari penelitian tersebut dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah. Nurbuko dan Achmadi (2007: 13) mengemukakan bahwa penelitian adalah usaha-usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran, dimana dalam usaha-usaha itu dilakukan dengan metode ilmiah. Sedangkan metode ilmiah ialah penggunaan proses berpikir deduktif-induktif untuk memecahkan masalah. Sejalan dengan pendapat tersebut, Nazir (2005: 84) menyatakan bahwa: penelitian adalah suatu proses mencari sesuatu secara sistematis dalam waktu yang lama dengan menggunakan metode ilmiah serta aturan-aturan yang berlaku. Untuk menerapkan metode ilmiah dalam praktek penelitian diperlukan desain atau model penelitian yang sesuai dengan kondisi, seimbang dengan dalam dangkalnya penelitian yang akan dikerjakan.

Selanjutnya oleh Nazir (2011: 93) menjelaskan bahwa desain penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan proses penelitian. Sedangkan Arikunto (2010: 90) menjelaskan bahwa, desain penelitian adalah rancangan yang dibuat penelitian sebagai ancar-ancar kegiatan yang akan dilaksanakan. Rancangan digunakan untuk menentukan metode penelitian yang akan menentukan kadar ilmiah hasil penelitian sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Metode merupakan suatu proses pengkajian masalah yang sistematis dan dilakukan secara ilmiah. Hal ini sejalan dengan pendapat Creswell (dalam Noor, 2012: 34) menyatakan bahwa "Penelitian kualitatif sebagai suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Penelitian kualitatif merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif".

Denzin dan Lincoln (dalam Moleong, 2012: 5) menyatakan bahwa "Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar ilmiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada". Kemudian Fraenkel & Wallen (dalam Creswell, 2013: 293) menyatakan bahwa: "penelitian kualitatif menekankan pada persepsi-persepsi dan pengalaman-pengalaman partisipan, dan cara-cara mereka memaknai hidup dan berfokus pada proses-proses yang terjadi, hasil dan *outcome*. Penelitian kualitatif secara khusus tertarik pada usaha memahami bagaimana sesuatu itu muncul. Tujuan penelitian kualitatif pada umumnya mencakup informasi tentang fenomena utama yang dieksplorasi dalam penelitian, partisipasi penelitian, dan lokasi penelitian".

Silverman (dalam Mulyadi, 2001: 156) mengatakan bahwa salah satu ciri penelitian kualitatif adalah bahwa tidak ada hipotesis yang spesifik pada saat penelitian dimulai, hipotesis justru dibangun selama tahap-tahap penelitian, setelah diuji atau dikonfrontasikan dengan data yang diperoleh peneliti selama penelitian tersebut. Nazir (2005:54) menyatakan bahwa penelitian deskriptif adalah: "suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskriptif atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki".

Dalam penelitian ini peneliti memakai desain penelitian deskriptif kualitatif untuk mendalami tingkat Analisis Data Sekunder Implementasi Kebijakan *Sistem Computer Assisted Test CAT* Pada Penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Provinsi Papua. Peneliti berusaha mendapatkan gambaran dari keadaan yang berlangsung secara konkrit sehingga dapat memperoleh data yang akurat untuk menganalisa fenomena yang diamati. Peneliti menggunakan teori model implementasi Van Meter dan Van Horn adalah sebagai berikut: Standar dan Sasaran Kebijakan; Sumber Daya; Komunikasi Antar Organisasi Terkait dan Kegiatan Pelaksanaan; Karakteristik Organisasi Pelaksana; Kecenderungan Pelaksana; Lingkungan Ekonomi Sosial Dan Politik.

Selanjutnya untuk melihat faktor yang menghambat dan mendukung Implementasi Kebijakan *Sistem Computer Assisted Test CAT* Pada Penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Provinsi Papua, dianalisis dengan menggunakan dimensi determinan Gibson (1992: 28), adalah Lingkungan, Teknologi, Pilihan Strategi, Struktur, Proses dan Kebudayaan. Hasil analisis tersebut diharapkan akan memunculkan temuan-temuan baru, baik yang berupa fakta empirik baru, teori baru atau memperkuat teori yang telah ada.

RESULT AND DISCUSSION

Standar dan Sasaran Kebijakan

Tahapan implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan dan sasaran ditetapkan terlebih dahulu yang dilakukan oleh formulasi kebijakan. Dengan demikian tahap implementasi kebijakan terjadi setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut. Standar dan sasaran kebijakan merupakan faktor-faktor yang menentukan kinerja kebijakan dan indikator kinerja merupakan hal yang penting dalam kebijakan publik, indikator kinerja menjadi apakah standar dan sasaran/tujuan telah direalisasikan.

Implementasi kebijakan bisa jadi gagal ketika para pelaksan tidak sepenuhnya menyadari perlunya standar dan tujuan kebijaka. Standar atau tujuan kebijakan memiliki hubungan erat dengan disposisi para pelaksana, oleh sebab itu pemahaman para pelaksana terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang penting untuk di ketahui. Hal ini dapat dimengerti bahwa standar yang telah ditetapkan tidak hanya dipahami dan dilakukan, namun menyangkut bagaimana tujuan kebijakan dapat dicapai. Karena tidaklah berarti jika dalam kebijakn yang hanya dapat melaksanakan standar yang telah ditetapkan namun tujuan kebijakan tidak dapat dicapai.

Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, diperlukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang professional, serta membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, (KKN) serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Seiring dengan paran diatas maka, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*. Salah satu pengembangan *E-Government* yang dilakukan adalah implementasi sistem *Computer Assisted Test* (CAT) yang dikembangkan Badan Kepegawaian Negara. Langkah tersebut untuk mewujudkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam melaksanakan Proses Rekrutmen atau seleksi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Implementasi kebijakan Sistem *Computer Assisted Test* (CAT) pada Penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintah Provinsi Papua. Dilaksanakan berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara, bahwa; Untuk melaksanakan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS), seleksi masuk sekolah kedinasan ikatan dinas, seleksi pengembangan karier, dan seleksi selain Aparatur Sipil Negara (ASN) yang objektif, transparan, akuntabel dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), perlu menggunakan metode *Computer Assisted Test*.

Terwujudnya manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang objektif, transparan, akuntabel dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Perlu mengukur kompetensi Dasar CPNS. Hal tersebut Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018. Pasal 3 Nilai ambang batas Seleksi Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (dua) yaitu: 143 (seratus empat puluh tiga) untuk Tes Karakteristik Pribadi; 80 (delapan puluh) untuk Tes Intelegensia Umum; dan 75 (tujuh puluh lima) untuk Tes Wawasan Kebangsaan.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, dalam rangka memenuhi peraturan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara. Dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018. Dapat diimplementasikan di Pemerintah Daerah Provinsi Papua, pada tahapan ini Kejelasan Sasaran Kebijakan Pemerintah Pusat dalam penerimaan CPNS berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penelusuran Data Sekunder dan Dokumen yang diperoleh peneliti tentang sasaran dan tujuan kebijakan implementasi kebijakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) pada penerimaan Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Papua. (dalam hal ini peneliti akan membahas secara umumnya Pemerintah Provinsi Papua dari 29 Kabupten/Kota. di akomodir Badan Kepegawaian Negara IX Provinsi Papua). Berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, salah satu tugas Badan Kepegawaian Negara adalah mengendalikan seleksi calon Pegawai Aparatur Sipil Negara, dengan Metode *Computer Assisted Test* (CAT). *Computer Assisted Test* yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu sistem seleksi dengan alat bantu komputer yang digunakan untuk mendapatkan lulusan yang memenuhi standar minimal kompetensi.

Pemerintah Daerah Provinsi Papua melalui Badan Kepegawaian Negara (Kanreg IX Jayapura), telah mengimplementasikan sistem *Computer Assisted Test* pada penerimaan Pegawai Negeri Sipil. Pemerintah Menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018. Pasal 1 Penetapan kebutuhan secara Nasional tahun 2018 yaitu *Zero Growth*. Total alokasi penetapan kebutuhan untuk Instansi Pusat dan Daerah sejumlah 238.015 (dua ratus tiga puluh delapan ribu lima belas) dengan rincian: Instansi Pusat sebanyak 51.271; dan Instansi Daerah sebanyak 186.744. Berdasarkan Kuota CPNS secara nasional diatas, maka Papua mendapatkan jatah 6.600 orang, dengan tambahan formasi guru dan kesehatan. Nantinya, 80% persen dari jatah itu dikhususkan untuk Orang Asli Papua (OAP) dan sisanya 20% untuk non-OAP.

Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Umum Tahun 2018 Pada Pemerintah Provinsi Papua yang Diselenggarakan dalam tahun Anggaran 2019 Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 510 Tahun 2018 Tanggal 30 Agustus 2018 tentang Formasi Umum Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Papua akan melaksanakan seleksi penerimaan CPNS Formasi Umum Tahun 2018 pada Pemerintah Provinsi Papua dan Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/97/Tahun 2019 Tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Penyaringan dan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah formasi umum tahun 2018 dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2019 yang diselenggarakan dalam tahun anggaran 2019 dengan ketentuan sebagai berikut;

Alokasi Formasi Pemerintah Provinsi Papua membutuhkan sebanyak 6.600 Formasi dengan alokasi sebagai berikut : 1. 80% alokasi formasi untuk Orang Asli Papua. 2. 20% alokasi formasi untuk Orang Non Papua. 3. Khusus untuk Formasi Teknis Lainnya hanya dapat dilamar oleh putra-putri Asli Papua

Tahapan Pengumuman tersebut berisi Tahapan Seleksi CPNS Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2019 yang terdiri dari 3 (tiga) tahap dengan sistem gugur meliputi Seleksi Administrasi, Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) dengan bobot 40%,

dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) menggunakan Computer Assisted Test (CAT) dengan bobot 60%.

Pemerintah menegaskan seleksi kompetensi Bidang CPNS diwajibkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 pada lampiran 1 huruf I (No. 3 Seleksi Kompetensi Bidang, (bagian 11) disebutkan bahwa: Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang di Instansi Daerah wajib menggunakan CAT;

Sebelum seleksi kompetensi dasar dan kompetensi bidang, Seleksi administrasi telah dilalui para peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) selanjutnya dalam tahap seleksi kompetensi dasar (SKD). SKD dilaksanakan dengan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT), dan tahap selanjutnya yakni seleksi kompetensi bidang (SKB), dengan menggunakan jarring LAN di setiap instansi pusat dan daerah. Pemerintah menerapkan seleksi berbasis sistem CAT merupakan salah satu penerapan sistem *e-government*.

CAT merupakan tes dalam seleksi CPNS berbasis komputer, dimana nilai dapat dimonitor langsung oleh masyarakat umum saat peserta mengerjakan soal atau usai tes. Dengan hadirnya CAT sejak tahun 2013, diharapkan negara mendapatkan sumber daya manusia yang profesional. CAT adalah suatu metode seleksi dengan alat bantu komputer yang digunakan untuk mendapatkan standar minimal kompetensi dasar yang digunakan dalam seleksi CPNS. Tujuannya untuk memperoleh ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, dan etika profesi dalam melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan. (sumber: menpan.go.id).

Beberapa prinsip dan tujuan pengadaan telah dijabarkan diatas. Sama Hal dengan pendapat Nitisemito (1996:36) bahwa tujuan dilaksanakan proses seleksi adalah untuk mendapatkan pegawai yang tepat (*the right man in the right place*). Dalam proses seleksi menurutnya harus bisa mendapatkan tenaga kerja yang tepat dalam posisi yang tepat pula. Pendapat ini menginspirasi bahwa di sektor pemerintahan dalam pengadaan dan rekrutmen CPNS perlu dilaksanakan secara ketat, selektif, dan transparan sehingga siapa saja yang mengikuti dan berkesempatan menjadi CPNS sangat terbuka lebar.

Pemerintah berkomitment membuka formasi CPNS tahun ini merupakan suatu hal terpenting dalam melaksanakan pengelolaan Manajemen Pegawai Negeri Pusat dan daerah. Sejak awal tahun 2015 hingga tahun 2016 Kepemimpinan Presiden Jokowi Widodo. Menetapkan kebijakan rekrutmen sekali lima tahun kedepan. Hal ini menjadi dasar penyelenggaraan CPNS tahun ini dengan menjaga kelangsungan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan ASN yang memasuki usia pensiun dan meninggal, mengakibatkan kekosongan pada birokrasi pemerintahan.

Implementasi CAT di provinsi Papua menjadi pertimbangan pemerintah papua. Dengan alasan kurang kesiapan-kesiapan yang mendukung implementasi CAT. Pada akhirnya kebijakan pemerintah terkait kewajiban menggunakan CAT pada CPNS tidak berjalan optimal di tahap pelaksanaan di daerah, banyak event-event yang timbul oleh masyarakat atau para pimpinan daerah, hal ini menjadi penghambat implementasi CAT dipapua.

Berdasarkan data yaitu penelitian mengenai pelaksanaan Seleksi CPNS yang dilakukan oleh Fitriana (2017) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa: "pelaksanaan Rekrutmen CPNS Kabupaten Paser di Kantor Badan Kepegawaian Daerah sudah berjalan dengan baik namun masih terdapat hambatan yang dihadapi seperti adanya kesalahan dari panitia pelaksana dalam

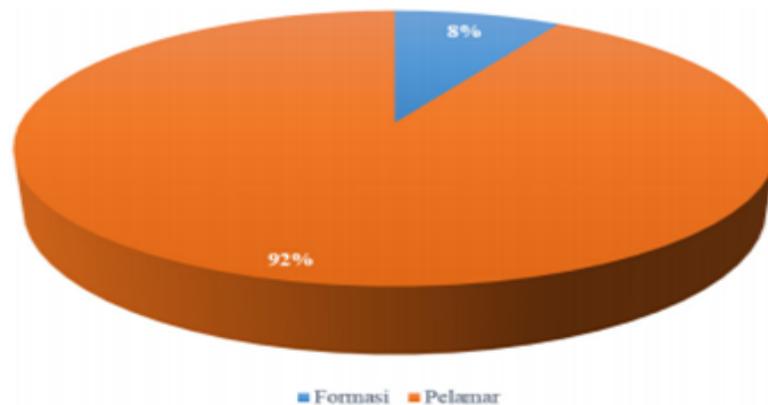
penginputan data mengenai pelamar yang lulus atau tidak lulus, dan masih kurangnya komunikasi mengenai informasi pelaksanaan rekrutmen CPNS di Kantor BKD Kabupaten Paser ke daerah-daerah terpencil sehingga calon pelamar yang ada di daerah terpencil banyak yang tidak mengetahui tentang adanya perekrutan CPNS”.

Kejelasan kebijakan sangat diperlukan dalam hal efektifitasnya pelaksanaan program-program. Dan kejelasan terkait peraturan-peraturan yang menjadi dasar penyelenggaraan. Lestari dkk (2018) menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi seleksi dan penempatan CPNS adalah Peraturan Pemerintah terkait formasi untuk memenuhi formasi yang wajib yaitu 5% dari seluruh formasi Provinsi Riau untuk S1 semua jurusan dan faktor waktu pelaksanaan seleksi.

Sasaran Kebijakan

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ke arah terwujudnya manajemen Aparatur Sipil Negara berdasarkan sistem merit, yang selanjutnya menjadi basis dalam mewujudkan birokrasi berkelas dunia.

Diagram Persentase Kebutuhan Formasi dan Pelamar



Penyelenggaraan Seleksi CPNS Tahun 2018 Permasalahan teknis dalam penyelenggaraan seleksi CPNS terkait perencanaan, persiapan, waktu, koordinasi, dan panitia seleksi. Hal ini menimbulkan persepsi kurang positif yang terjadi dalam masyarakat berkaitan image pelayanan publik (seleksi CPNS) yang terkesan belum maksimal, dimana beberapa instansi masih terkendala dengan infrastruktur dan komponen fasilitas penyelenggaraan seleksi Computer Assisted Test (CAT). Di Yogyakarta pemerintah menunda tes seleksi CPNS akibat sarana komputer yang tidak tercukupi, dari 2000 peserta yang akan mengikuti tes Computer Assisted Test (CAT) hanya 240 unit komputer yang disediakan oleh panitia penyelenggara, namun demikian dapat diatasi komputer tambahan yang disediakan baru tiba di lokasi satu hari sebelum pelaksanaan ujian CAT (Mustaqim, 2018:26). Permasalahan infrasturuktur lainnya berasal dari server, hal ini dapat dilihat dari postingan pendaftar di akun resmi twitter BKN, dimana beberapa pendaftar mengalami kesulitan saat mengakses website yang beberapa kali mengalami *down server* sehingga proses pendaftaran akun membutuhkan tambahan periode waktu pendaftaran.

Kebijakan Jaringan Internet Untuk Mendukung Implementasi Sistem Computer Assisted Test Pada Penerimaan Pegawai Negeri Sipil Di Provinsi Papua Berdasarkan Analisis Data Sekunder

Penerimaan CPNS secara Nasional Oleh Badan Kepegawaian Negara BKN menggunakan satu formulasi baru dengan aplikasi sistem Computer Assisted Test (CAT) dan diberlakukan untuk semua provinsi maupun kementerian dalam merekrutmen Aparatur Sipil Negara. Upaya yang dilakukan oleh BKN untuk menghindari berbagai persoalan, permainan buruk selumnya, penerimaan calon ASN dengan pemberkasan bentuk sistem offline.

Sebelumnya pemerintah meyelenggarakan seleksi dengan metode tertulis dan penilaian secara tertutup oleh organisasi bersangkutan. Seiring dengan pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan perkembangan informasi dan komunikasi maka berkembang pulu, salah satu organisasi pemerintah yang telah menerapkan sistem seleksi Berbasis Computer adalah Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Kebijakan tersebut diberlakukan untuk secara umum bagi pemerintah dalam Penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dimana secara khusus dikelola oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi. (MEMPAN-RB) dalam Implementasi aplikasi CAT Pemerintah Provinsi Papua, resmi memulai pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) untuk Tes CPNS Formasi tahun 2018 pada Rabu 19 Juni 2019.

Penerimaan PNS menggunakan aplikasi CAT Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua mengalami problem akibat keterbatasan jaringan internet dan kurangnya ketersediaan sarana perasarana computer, serta peserta yang masih awam dalam menggunakan computer secara online, hal tersebut menjadi pertimbangan besar bagi pemerintah dalam melaksanakan perekrutmen menggunakan aplikasi CAT.

Persolan lain adanya penolakan dari warga papua terhadap penggunaan aplikasi CAT, karena jaringan internet yang tidak memadai maka 75 persen wilayah pegunungan tidak bisa menerapkan sistem online, sehingga akan merugikan rakyat Papua yang ingin ikut test. Selain konsekuensi dari pada moratorium yang cukup lama sehingga pencari kerja sudah menumpuk dipapua (sumber:www.papua.today.com) Persolan lain pembatasan jaringan internet dilakukan oleh pemerintah dalam mengotrol situasi politik.

Penolakan tersebut direspon baik oleh pemerintah daerah dengan pertimbangan kondisi geogefaris dan sarana prasarana yang dimiliki oleh pemerintah dalam melaksanakan kebijakan, dengan offline. Kebijakan tersebut Sebagian masyarakat menilai akan adanya kepentingan-kepentingan terselubung dalam menyeleksi ASN dipapua. Dengan keterbasan akses yang dialami oleh Pemerintah daerah akibat pembatasan jaringan internet yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini kementerian Kominfo, dan belum adanya kebijakan implementasi internet secara menyeluruh.

CONCLUSION

Berdasarkan penelusuran Data Sekunder dan Dokumen yang diperoleh peneliti tentang implementasi kebijakan sistem *Computer Assisted Test (CAT)* pada penerimaan Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Papua. Dalam hal Kesiapan pelaksanaan Implementasi Kebijakan Sistem Computer Assisted Test (CAT) Pada Penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Provinsi Papua. Sejak menetapkan kebijakan rekrutmen CPNS Belum berjalan optimal karena sumber-sumber daya yang mendukung pelaksanaan CAT menjadi hambatan. Dan sementara itu kondisi lingkungan lingkungan yang menjadi faktor kendala implementasi sistem CAT. Untuk melihat

proses implementasi kebijakan dalam peneliti ini peneliti menggunakan model Van Meter dan Van Horn.

Pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*. Salah satu pengembangan *E-Government* yang dilakukan adalah implementasi sistem *Computer Assisted Test (CAT)* yang dikembangkan Badan Kepegawaian Negara. Langkah tersebut untuk mewujudkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam melaksanakan Proses Rekrutmen atau seleksi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Implementasi kebijakan sistem *Computer Assisted Test (CAT)* merupakan alat bantu *Computer* yang digunakan dalam seleksi Kompetensi dasar dan kompetensi bidang CPNS. Hadirnya sistem CAT sejak tahun 2013, tersebut Negara mendapatkan sumberdaya Aparatur Sipil Negara berdasarkan kompetensi yang dibutuhkan suatu organisasi pemerintahan. Namun perlu kita ketahui bahwa implementasi sistem CAT didukung dengan jaringan internet yang baik. Berdasarkan analisis data sekunder dalam penelitian yang menjadi sukses atau tidaknya implementasi CAT adalah akses jaringan internet yang dapat menghubungkan semua aktivitas pemerintah dalam penerapan *e-government*. Di setiap kabupaten kota.

Pemenuhan jaringan internet terbatas sehingga setiap kebijakan tidak dapat berjalan secara berimbang dengan kapasitas daya saing yang rendah harus adanya alat pendukung dalam kebijakan selanjutnya agar memberikan peluang terhadap masyarakat, sebab fasilitas jaringan yang baik dapat membantu para peserta ASN mengikuti CAT dengan efektif. Pentingnya perencanaan secara berjenjang agar satu indikator tidak mempengaruhi indikator lainnya.

REFERENCES

- Agustino, Leo, 2008. *Dasar - Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, Suharsimi, 2010, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Ahmadi dan Hermawan. 2013. *E-Business & E-Commerce*. Yogyakarta: hlm68.
- Bangun, Wilson. 2012. *Manajemen sumber daya manusia*. Jakarta Erlangga.
- Creswell, John W, 2013, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed Edisi Ke-3*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- Davis, Gordon, 2002. *Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen Bagian 1 Pengantar*. Jakarta: Pustaka Binamaan Pressindo.
- Gulo, 2007, *Metodologi Penelitian*. Grasindo Jakarta.
- Hamdi, Muchlis, 2015, *Kebijakan Publik Proses, Analisis dan Partisipasi*. Ghailia Indonesia. Bogor.
- Horoepoetri, Arimbi, Achmad Santosa, 2003, *Peran Serta Masyarakat dalam Mengelola Lingkungan*. Jakarta: Walhi.
- Islamy, Irfan, 2007, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Kusumanegara, Solahudin, 2010, *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Penerbit Gava Media, Yogyakarta.

- Loudon, Kenneth, C. dan Loudon, Jane. P. 2008. Sistem Informasi Manajemen, Jakarta: Salemba Empat.
- Marwansyah.2012. Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Kedua : Bandung Alfabeta.
- Moleong, Lexy J, 2012, Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mondy, R. Wayne. 2008. Manajemen Sumber Daya Manusia, Jilid 1 Edisi 10, Wibi Hardani: Jakarta Erlangga.
- McLeod, Rayman. 2004. Sistem Informasi Manajemen. Jakarta: PT Indeks.
- Muammar Himawan. 2004, Pokok-Pokok Organisasi Modern. Bina Ilmu. Jakarta.. hlm. 51.
- M. Faisal, Sistem Informasi Manajemen Jaringan. Malang: UIN - Malang Press, 2008.
- Malayu Hasibuan, 2003. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muttalib, M.A & Mohd, Akbar Ali Khan, *Theory of Llocal Government*, MIPI Jakarta, 2013
- Nugroho, Riant, 2011, *Public Policy* Dinamika Kebijakan - Analisis Kebijakan - Manajemen Kebijakan, Alex Media Komputindo. Jakarta.
- Noor, Juliansyah, 2012, Metodologi Penelitian, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Norbuko, Cholid dan Abu Achmadi, 2007, Metodologi Penelitian, Bumi Aksara, Jakarta.
- Nazir, Mohammad, 2005, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Nazer, Moh, 2011, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Rangkuti, Freddy, Teknik Membedah Kasus Bisnis Analisis SWOT, Gramedia pustaka Utama, Jakarta, 2016.
- Rivai, Veithzal. 2005. Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan Dari teori Ke Praktik. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Ryaas Rasyid. 2002, Menolak Resentralisasi Pemerintahan. Jakarta Millennium Publisher.
- Rees,David dan Mc Bain. 2007. People Management : Teori dan Strategi, Tantangan dan Peluang, Tri Wibowo, Jakarta : Kencana
- Sugiyono, 2012, Memahami Penelitian Kualitatif, Alfabeta, Bandung.
- Satori, Komariah, 2013. Metodologi Penelitian Kualitatif. CV. Alvabeta. Bandung.
- Sadjijono, 2008, Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi, Laksbang Pressindo. Yogyakarta.
- Syafiie, Inu Kencana, 2009, Pengantar Ilmu Pemerintahan. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Subarsono, 2011, Analisis Kebijakan Publik, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Susipto, 2013. Sistem Informassi Manajemen Berbasis Tren Teknologi dan Informasi. Serang: Sahaya Minolta.
- Subekti, Akhmad dan Jauhar, Mohammad. 2012. Pengantar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM). Jakarta : Prestatasi Pustaka Jakarta

- Sulistiyani, Ambar Tegur dan Rosidah. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jogjakarta : Garha Ilmu
- Soerjono Suekamto, 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sarwono, 2002, *Perilaku Sosial Individu dan Teori-Teori psikolog Sosial*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Silalahi. Ulber, 2011. *Asas Asas Manajemen*. Bandung: Refika Aditama Subagyo P. Joko. 2011. *Metdologi Penelitian Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Siagian, Sondang P. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Sedarmansyanti. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung : Refika Aditama.
- Tahjan, H. 2008, *Implementasi Kebijakan Publik.*, RTH, Bandung,
- Tjokroamidjojo. B, 2000, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, PT. Pustaka LP3TS Indonesia, Jakarta.
- Tachjan. H, *Implementasi Kebijakan Publik*, Bandung : AIPI, 2006.
- Wasistiano, Sadu, 2015, *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. IPDN Press. Sumedang.
- Wahab, Abdul, Solichin, 2010, *Analisis Kebijaksanaan*. PT. Bumi Aksara, Jakarta
- Winarmo, Budi, *Teori dan Proses Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*, CAPS, Yogyakarta. 2002, hal 158
- Widjaja A.W, 2006. *Administrasi Kepegawaian*. Jakarta: Rajawal
- Widodo Joko. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing. 2011 hal 96-97
- S.F. Marbun, *Ringkasan Disertasi Eksistensi Asas-asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang layak dalam menjelmkan pemerintahan yangbaik dan bersih*. Universitas Padjajaran. Bandung.2001.
- Husen Husaeni. 2013 “*Optimalisasi Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Di Kota Banjar*” (Studi Kasus di Kecamatan Langensari)
- Febrina Wulandari. 2014, “*Implementasi Metode Computer Assisted Test (CAt) Pada Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya*”
- Ni Made Sri Astuti. 2016, “*Implementasi Sistem Computer Assisted Test (Cat) Dalam Rekrutmen Pegawai Guna Menghasilkan Pegawai Yang Berkualitas di Kabupaten Kapuas Hulu*”
- Zainal, Z., & Zeriand, D. (2022). Good Governance in Corporate Social Responsibility (CSR) Program at Siak Regency. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 10(3), 763-782.
- Zainal, Z. (2023). Policy Formulation Of Expansion And Change Status Of Kelurahan To Village In Kampar District Riau Province. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4(2), 687-696.
- Zainal, Z., & Cahyadi, M. (2023). Collaboration Governance In Development Of Tourism Objects In Kampar Regency Riau Province. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4(2), 736-744.